KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENJALANKAN KERJASAMA *SISTER CITY* DENGAN KOTA BRAUNSCHWEIG TAHUN 2000-2012

Penulis : Akbarizal Alireksa Bashar

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Universitas : Universitas Komputer Indonesia

Alamat : Jl. Dipatiukur No.102-116, Indonesia

Lembaga Penelitian : Pemerintah Kota Bandung

Alamat : Jl. Wastukancana No.2, Bandung

E-Mail : akbarizal37@yahoomail.com

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENJALANKAN KERJASAMA *SISTER CITY* DENGAN KOTA BRAUNSCHWEIG TAHUN 2000-2012

Oleh*:*
AKBARIZAL ALIREKSA BASHAR
NIM :44308844
Skripsi ini di bawah bimbingan:
Dewi Triwahyuni, S.IP, M.Si

Kerjasama Sister City Bandung-Braunschweig terbentuk dari adanya kesamaan Kota ini mengenai bidang pendidikan yang disarankan oleh salah satu staff *UNESCO* di tahun 1960, dengan harapan berkembangnya kerjasama internasional pada berbagai bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana *Paradiplomacy* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung Dalam Menjalankan Kerjasama *Sister City* dengan Kota Braunschweig Tahun 2000-2012 dan bagaimana kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota Bandung sendiri sebagai aktor dalam kerjasama *Sister City* dan hubungan luar negeri Indonesia**.** Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data *online*, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan teori Ilmu Hubungan Internasional.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Global Paradiplomacy* yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan Pemerintah sub nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub nasional maupun kedua wilayah negara tersebut tidak berbatasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kewenangan pada Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan hubungan luar negeri, kerjasama *Sister City* dengan Kota Braunschweig. Setelah *MoU* diperbaharui pada tahun 2000, telah menunjukan adanya perkembangan pada Pemerintah Kota Bandung dengan Braunschweig yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan kerjasama *Sister City* lebih mendalam.

Namun meski dari segi teknis telah berjalan dengan baik, akan tetapi kendala non-teknis menjadi suatu persoalan dalam kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan dan pencapaian dari kerjasama *Sister City* sendiri masih dalam bentuk sosialisasi dan pengembangan sinergitas antar berbagai elemen yang terlibat pada kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig tahun 2000-2012.

Kata kunci: Kewenangan, Paradiplomasi, *Sister City*, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Braunschweig.

ABSTRACT

AUTHORITY OF IMPLEMENT SISTER CITY PARTNERSHIP BY THE CITY GOVERNENT OF BANDUNG WITH CITY GOVERNMENT OF BRAUNSCHWEIG 2000-2012

By:
AKBARIZAL ALIREKSA BASHAR
NIM: 44308844
This final project under the guidance of:
Dewi Triwahyuni , S.IP, M.Si

Cooperation Sister City Bandung-Braunschweig formed from a common city is about education suggested by one of the staff of UNESCO in 1960, with hopes of growing international cooperation in the various fields. This study is intended to determine how Paradiplomacy conducted by Government of Bandung In Running Sister City Partnership with the City of Braunschweig Year 2000-2012 and how the authority vested in the Government of Bandung itself as an actor in the Sister City partnership and Indonesia's foreign relations . Research methods used are descriptive analytical methods, with the aim of describing the facts relating to the problem under study. Most of the data collected through library research, online data retrieval, documentation, interviews and observations are then analyzed with the approach of International Relations theory.

The theory used in this study is the Global Paradiplomacy paradiplomasi performed by sub-national governments in a country with sub- national governments in other countries, either both national and two sub regions of the country not bordering results showed that the implementation of the authority of the Government Bandung city in running foreign relations, Sister city partnership with the City of Braunschweig. After the MoU renewed in 2000, has shown the development of the Government of Bandung with Braunschweig who are committed to developing a more in-depth cooperation Sister City.

However, although from a technical point had been going well, but the non-technical constraints become an issue in the Sister City partnership Bandung - Braunschweig. Efforts made in the development and achievement of the Sister City partnership is still in the form of socialization and development of synergy between the various elements involved in the Sister City partnership between the Government of Bandung City Government Braunschweig years 2000-2012.

Keywords: Authority, Paradiplomacy, Sister City, Bandung City Government, City Government of Braunschweig

1. Pendahuluan

Proses globalisasi dan integrasi regional menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam perkembangan peranan Pemerintah Sub-Nasional di berbagai Negara. Dalam konteks kerjasama dan hubungan internasional, meningkatnya interaksi global dapat membuat aktor Sub-Nasional untuk mengembangkan keragaman budaya dan bahasa yang dapat meningkatkan kemungkinan terciptanya hubungan dengan pihak Lembaga dan Pemerintah Asing.

Pada dasarnya pelaksanaan hubungan luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun seiring dengan perkembangan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan mekanisme dan koordinasi yang sesuai dalam hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementrian Luar Negeri menyusun suatu panduan bagi pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri, yakni dengan keluarnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada hal tersebut Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, melalui Direktur Hukum, Dian Nurbintoro yang disampaikannya melalui seminar *Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Polugri Indonesia*, menyimpulkan bentuk kerjasama internasional yang lazim dilaksanakan Pemerintah Daerah, yakni dengan adanya *Sister City, Technical Cooperation, Sub Regional Economic Cooperation, Cooperation With Foreign Non-Governmental Organization, Foreign Journalistic Activities, Diplomatic Facilities For Representatives of Diplomatic / Consular in The Region, Handling Foreign Citizens in The Region, Protocol Service Involving Other Countries*, dan *Conclude International Agreements* (Nurbintoro, 2011:11).

Sister City merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang mempunyai peranan bagi perkembangan masyarakat di Daerah dimana jalinan hubungan kerjasama yang tertuang dalam *Sister City* atau dapat disebut juga Mitra Kota dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah dan Masyarakat di Indonesia

Sister City di Kota Bandung sendiri, diawali pada tanggal 2 Juni 1960 yang ditandai dengan ditandatanganinya Piagam Persahabatan Bandung-Braunschweig, oleh Walikota Bandung pada saat itu yakni, R.Priatnakusumah serta Prof. Dr. George Eckert yakni utusan Kota Braunschweig di Bandung

Peranan Pemerintah Daerah/Kota Bandung sebagai aktor Sub-Nasional dalam menjalankan hubungan luar negeri, dapat memberikan pengaruh yang luas bagi pembangunan di Kota Bandung. Selain itu, *Sister City* merupakan bentuk kerjasama internasional yang mempunyai ciri tersendiri dimana peneliti merasa kerjasama *Sister City* apabila didalami dan dioptimalkan akan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Kota Bandung menjalankan hubungan luar negeri dalam konteks kerjasama *Sister City* dengan Kota Braunschweig?"

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan hubungan luar negeri yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan mitra Internasional, khususnya dengan Pemerintah Kota Braunschweig, Kota Bandung sebagai *Unit-level* dan *Interstate* dalam pelaksanaan hubungan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Luar Negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara-Negara yang menjadi mitra *Sister City* Kota Bandung yang dapat menunjang bagi pembangunan di Kota Bandung..

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas kasus dalam jurnal penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisa Hubungan Luar Negeri dalam bentuk Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan mitra Kerjasama *Sister City* Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Hubungan Luar Negeri pada bentuk Kerjasama *Sister City*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak dari hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Hubungan luar Negeri dalam bentuk kerjasama *Sister City*.
4. Untuk mengetahui apa saja rekomendasi yang dapat diberikan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Bandung dari hasil kerjasama *Sister City.*
5. Untuk mengetahui dan menganalisa kondisi terkini Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Hubungan Luar Negeri dalam bentuk kerjasama *Sister City*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan rangkaian disiplin ilmu yang telah didapatkan penulis selama masa kuliah di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung, sehingga adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai pelaksanaan Hubungan internasional yang dilakukan oleh Unit Level dan *Interstate* pada suatu Negara, atau aktor Sub-Nasional. Khususnya dalam kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota yang menjadi Mitra Kerjasama *Sister City* Kota Bandung,

yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Bandung, dan dalam rangka untuk menjalin serta meningkatkan hubungan luar negeri antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lainnya di Dunia.

1.4.2 Kegunaan Praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan dan informasi dan studi empiris bagi para akademisi ilmu hubungan internasional yang menaruh minat pada hubungan internasional yang dilakukan oleh *Non-State Actor*, *Unit Level*, dan *Interstate* pada suatu Negara dalam pelaksanaan Hubungan Luar Negeri yang dilakukan aktor paradiplomasi.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Teori Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan publik suatu Pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan publik

Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu Negara, diplomasi regional tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingannya lebih untuk menunjukan pada masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan Negara, dan berada pada pengawasan Negara, akan tetapi untuk mengembangkan daerahnya para aktor tersebut mempunyai kebebasan dalam menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai, dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan Negara dan mengikuti sistem internasional yang berlaku yang menjadikan aktor Negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut, hal ini disebut Paradiplomasi

Sedangkan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan Braunschweig merupakan bentuk *global Paradiplomasi* yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan pemerintah sub nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub nasional maupun kedua wilayah negara tersebut tidak berbatasan

Teori *Sister City*

Apabila ditelaah dari tata bahasanya Sister City terdiri dari 2 kata yakni *Sister* (saudari perempuan) dan *City* (Kota), dalam hal ini *Sister City* berarti Kota bersaudara dimana dalam perkembangannya yang berorientasi pada pershabatan dan kemitraan, hubungan kemitraan yang terjalin dalam konteks hubungan antar Kota dalam kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu dan menganut prinsip perlakuan yang sama atau *Reciprocal*

Kerjasama *Sister City* dapat diartikan sebagai hubungan formal antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Lokal lainnya yang mempunyai kedudukan setara yang melewati batas Negara, akan tetapi *Sister City* sendiri dapat berupa hubungan antara Negara dengan Kota yang tujuannya terhubung pada tujuan-tujuan internasional

Kerjasama *Sister City* Sendiri terbentuk karena adanya Persamaan kedudukan dan status administrasi, Persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, Persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, Persamaan permasalahan yang dihadapi, dan *Komplementaritas* antara kedua pihak dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama dalam pertukaran kunjungan pejabat atau pengusaha, yang

nantinya akan menimbulkan kerjasama dalam hubungan barang dan jasa.

3. Objek Dan Metode Penelitian

Pemerintahan Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung merupakan penentu kebijakan dan arah dari apa yang menjadi tujuan bagi masyarakat Kota Bandung sendiri, dalam *Sister* City dengan Braunschweig, dimulai pada tahun 1960, dimana tujuannya untuk meningkatkan hubungan yang lebih mendalam pada interaksi masyarakat internasional

Visi dan misi pemerintahan Kota Bandung

Kota Bandung memiliki visi terwujudnya kota Bandung sebagai Kota jasa yang "Bermartabat" yang memiliki arti bersih, makmur, taat, dan bersahabat, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya
2. Kota Bandung sebagai Kota jasa harus memiliki warga yang bersahabat
3. Kota Bandung sebagai Kota yang terbuka dan menjujung nilai agama dan kemanusiaan

Program Strategi Pemerintah Kota Bandung

Dalam rangka mengembangkan Kota Bandung dan menjalankan Pemerintahan di Kota Bandung, Pemerintah berupaya merealisasikannya dengan mengaplikasikannya ke dalam Program Strategi Kota Bandung yang terbagi kedalam

1. Strategi Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religious
2. strategi dalam rangka mengembangkan perekonomian kota
3. Strategi dalam rangka mengembangkan sosial budaya kota yang ramah
4. Strategi dalam rangka meningkatkan penataan kota
5. Strategi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah Kota
6. Strategi dalam rangka mengembangkan sistem keuangan kota

Mekanisme Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Hubungan Luar Negeri

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki dan mengacu pada UU NO. 37/1999 pasal 1 ayat 1 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 32/2004 pasal 42 tentang pemerintahan daerah, sedangkan hukum internasional hanya mengenal perjanjian antar Negara tanpa melihat bagaimana sistem internal Negara meningkatkan diri pada suatu perjanjian internasional, oleh karena itu dalam Panduan Umum tata cara hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah dalam BAB III, point 20 disebutkan syarat kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

1.Dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI.
2.Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah.
3.Mendapat persetujuan DPRD.
4.Tidak mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri
5.Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam neg eri masing-masing negara.
6.Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
7.Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
8.Mendukung Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Sehingga pemerintah daerah bertindak membawa nama Negara bukan atas nama Pemerintah Daerah, dalam mengaplikasikan kewenanangannya, prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui 3 bagian yakni Mekanisme daerah, Mekanisme internal, Mekanisme Eksternal

Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung

Sejak tanggal 1 Januari 2008, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, peristilahan untuk Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) telah dirubah menjadi Bagian Pemerintahan Umum, Pemerintahan Umum merupakan bagian yang membidangi Otonomi Daerah pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan, kerjasama Hubungan Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri.

Kerjasama *Sister City* Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung telah memiliki program *Sister City*, sebagai jembatan bagi potensi masyarakat Kota Bandung untuk berkembang dalam masyarakat dunia dan menjadikan payung bagi pengembangan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dunia. Kota Bandung mengadakan hubungan kerjasama *Sister City* sejak tahun 1960 dengan Kota Braunschweig-Jerman, sehingga menjadi kota pertama sekaligus terlama dalam penyelenggaraan Program *Sister City* di Indonesia, Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, Kota Bandung telah memperluas jalinan hubungan kerjasama dengan Kota-kota lain di luar negeri, seperti dengan Kota Fort Worth-Amerika Serikat; Kota Suwon-Republik Korea (Korea Selatan); dan Kota Yingkou serta Kota Liuzhou-Republik Rakyat China, Jalinan hubungan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung dengan Kota-kota lainnya, baik di dalam maupun luar negeri berlandaskan pada peraturan dan hukum yang berlaku

Sister City Kota Bandung dengan Kota Braunschweig, Jerman

Latar belakang kota Braunschweig yang memiliki banyak kesamaan dengan Kota Bandung, menjadi salah satu faktor terjalinnya kerjasama, dan landasan atau dasar dari keinginan Kota Braunschweig dan Bandung mengadakan *Partnership* bermula dari saran Prof.DR. George Eckert, salah satu staf *UNESCO*, berpijak dari kenyataan bahwa kedua kota ini terdapat dua perguruan tinggi keguruan yakni *Padagogische Hochschule* yang berada di Braunschweig dan di Bandung terdapat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang pada saat itu bernama *PTPG*, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang kita kenal sekarang bernama Universitas Pendidikan Indonesia.

Pada tanggal 24 juli 1959, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh *atase* kebudayaan Republik Indonesia di Bonn, Jerman yakni Bapak Marjoenani, Mengemukakan hasrat untuk mengadakan hubungan persahabatan kedua kota yakni Bandung dan Braunschweig, guna merealisasikan hubungan persahabatan ini maka pada bulan September 1959 dilakukan pertemuan khusus antara Duta Besar Republik Indonesia yakni Dr. Zairin Zain dengan Prof. DR. George Eckert.

Pada suatu seminar tanggal 10 mei 1960 secara resmi hal tersebut disampaikan oleh *atase* kebudayaan Republik Indonesia, yang pada saat itu dijabat oleh Rochmat Hardjono kepada Direktur Kota Braunschweig, Hans Gunther Weber di Balai kota Braunschweig.

Tanggal 18 mei 1960 Pemerintah Kota Braunschweig menyetujui usulan tersebut, pada tanggal 24 mei 1960 di museum Kota Braunschweig dilaksanakan upacara khusus yang meresmikan persahabatan kedua kota tersebut dengan ditandai penandatanganan piagam ikatan persahabatan Bandung-

Braunschweig oleh Duta Besar Republik Indonesia pada saat itu yakni Dr.Zairin Zain dan Hans Gunther Weber selaku direktur Kota Braunschweig dan Mrs. Martha Fuchs selaku *Oberburgermeister* yang berarti Walikota Braunschweig.

Dengan pertimbangan bahwa kerjasama ini harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga diakui oleh dunia internasional, maka hubungan kerjasama yang telah berjalan lebih dari 40 tahun kemudian diperbaharui dengan ditandatanganinya *MoU*(*Memorandum Of Understanding*) oleh WaliKota Bandung, Aa Tarmana dan Walikota Braunschweig pada saat itu yakni Werner Steffens Pada tanggal 19 juni 2000 di Kota Braunschweig, Jerman. (Pemerintah Kota Bandung, 2011:14).

Kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig yang telah berlangsung hingga saat ini yang berlandaskan *Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani tanggal 2 Juni 1960 merupakan sebuah momentum yang menjadi awal bagi perkembagan *Sister City* di Indonesia, telah menghasilkan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan antara kedua Kota, yaitu dalam bidang:

Kebudayaan, Pendidikan dan pelatihan, Program olahraga, Program pertukaran pemuda, Program ekonomi dan perdagangan,

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan suatu rancangan dan kerangka metode penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif analasis*, penelitian tersebut adalah penelitian yang secara menyeluruh, dimaksudkan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai fenomena/kejadian tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus deskriptif, merujuk pada permasalan dan *variabel* tersedia peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data dan informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan sumber-sumber lainnya dalam membahas permaslahan yang diteliti peneliti, sehingga validtias data yang nantinya akan diolah dapat teruji dan dipertanggung jawabkan secara akademis.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan**,** dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kepustakaan dengan menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga data-data pendukung dari media internet serta media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya.

Penelusuran Data melalui *Internet* dan Media *Online***,** peneliti dapat menggunakan Media Internet untuk mengumpulkan berbagai informasi, data, dan referensi yang terkait dengan permaslahan yang diteliti yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya.

Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak dari Pemerintah Kota Bandung dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementriaan Luar Negeri Republik Indonesia.

Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan teknik *Purposive*, yakni penentuan pada pihak-pihak informan bedasarkan tujuan, masalah, dan variabel penelitian, Metode yang digunakan adalah metode wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. peneliti bertemu dengan narasumber yang menjadi salah satu pegawai, staff, maupun anggota tim dalam bidang dokumentasi yang secara komprehensif mendeskripsikan seputar program-program yang dijalankan pada kerjasama *Sister City* di Kota Bandung.

Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data pada penelitian ini adalah, *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu bagian dari proses analisa dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.

1. Hasil dan Pembahasan

Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig belum dapat dirasakan oleh masyarakat luas baik yang berada di Kota Bandung maupun Kota Braunschweig, tidak hanya itu saja belum tersosialisasikannya kerjasama *Sister City* antara Bandung dengan Braunschweig menjadikannya kerjasama yang sangat potensial ini terkesan hanya sebagai suatu momentum yang implikasinya belum dapat diapresiasi oleh berbagai pihak yang seharusnya dapat merasakan aplikasi nyata dari adanya realisasi dari berbagai program yang telah disepakati pada kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig.

Dinamika politik di Indonesia baik dalam hirarkis struktural Pemerintah Pusat maupun Daerah sangat terasa berdampak pada perkembangan kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig, dalam hal kewenangan pemerintah kota bandung dalam menjalankan kerjasama *Sister City* dengan Pemerintah Kota Braunschweig, internalisasi kepentingan politik terhadap suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah sangat kental, yang menjadikannya batasan dalam perkembangan pembangunan baik daerah maupun pusat, dalam konteks hubungan internasional yang dilakukan oleh *non-state actor* kerjasama luar negeri dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun negara

Pemerintah Kota Bandung sudah berupaya maksimal dalam menjalankan kewenangannya pada kerjasama *Sister City* dalam suatu hubungan luar negeri atas nama Negara Indonesia, undang-undang yang terkait dengan hal inipun sudah sangat relevan untuk memaksimalkan aktor sub-nasional yang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam peranan paradiplomasi global.

Tinggal bagaimana seluruh elemen dapat dimaksimalkannya, sehingga dalam penyelenggaraan kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig, dalam kewenangan Pemerintah Kota Bandung, dapat dijadikan tolak ukur bagaimana kontribusi dari aktor-aktor paradiplomasi sebagai pelaku yang bersentuhan langsung terkait dengan suatu hubungan luar negeri dapat dimaksimalkan dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi paradiplomasi lainnya di Indonesia.

2. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig masih

harus didukung dan dikembangkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan kerjasama *Sister City* ini, Pemerintah Kota Bandung sendiri dalam kewenangannya dalam menjalankan kerjasama *Sister City* dengan Pemerintah Braunschweig sudah cukup optimal meski perlu adanya perkembangan yang lebih mendalam untuk merealisasikan kerjasama *Sister City* ini agar manfaat dari adanya kerjasama *Sister City* ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak.

Paradiplomasi merupakan salah satu konteks dalam menjalin hubungan luar negeri yang dapat memberikan sumbangsih yang sangat potensial baik dalam menjaga integritas antar negara ataupun dalam menjalin kerjasama internasional, karena dari adanya kemitraan dalam konteks paradiplomasi dirasa lebih langsung mengena dan memiliki ikatan integritas yang mendalam, sehingga hal inilah yang dirasa cukup memiliki potensi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama baik antara pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Kota Braunschweig,

Pembangunan *Sister City* juga harus mempertimbangkan daya dukung Kota, karena pengembangan *Sister City* ini akan berdampak luas tidak saja akan meningkatkan peranan *Sister City* ini secara ekonomi tetapi menjadi *multiplier effect* bagi pengembangan *sektor* lain. Kolaborasi sebuah kota dengan kota sahabat akan sangat membantu proses belajar cepat sebuah kota, menciptakan keterkaitan (*linkage*) kepentingan yang lebih luas (*broad-base*). Keberadaan Bandung *Sister City* pada dasarnya memiliki makna dan sarat dengan misi untuk pengembangan Kota Bandung di masa depan. Sebab bila ditelaah banyak nilai positif yang dapat dipetik dari misi *Sister City* tersebut. Terutama dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi di Kota Bandung.

Dalam prakteknya, *Sister City* akan membawa gerakan nasional untuk pembangunan masyarakat kota dan aktivitas tenaga sukarela ke dalam arena global. *Sister city* memotivasi dan memberikan wewenang kepada para profesional kota, pemimpin masyarakat, organisasi pemuda, dan institusi pendidikan untuk mengadakan proyek-proyek jangka panjang yang saling menguntungkan dengan "saudara kembarnya" di berbagai negara di penjuru dunia, khususnya dalam hal ini Kota Braunschweig.

Multiplier Effect dengan adanya kota kembar ini selain terjalinnya persahatan antar kota, ternyata juga dapat mendorong kreativitas dan terciptanya peluang bagi masyarakat untuk belajar dan menimba pengalaman di berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, perdagangan, sosial, dan rohani. Dampak positif dengan adanya program kota kembar ini yang nantinya diharapkan akan memperkuat pembangunan dan peradaban suatu kota.

5.2 Saran

Ada beberapa hal yang dirasakan mengenai kurang optimalnya kewenangan kerjasama *Sister City* yang dijalankan pemerintah Kota Bandung terhadap Pemerintah Kota Braunschweig, yakni terkait dengan :

1.Pembinaan hubungan kerjasama, dalam hal ini pemerintah Kota Bandung dapat mengembangkan hubungan kerjasama sister city dengan Pemerintah Kota Braunschweig dimana adanya sinergitas antara Bandung dengan Braunschweig, sehingga komitmen yang telah disepakati dapat dijalankan secara bersama-sama

2.Ketersediaan dana, dalam merealisasikan kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig perlu dikaji lebih mendalam mengingat kurangnya partisipasi sumbangsih secara materi, sehingga pemerintah kedua kota perlu mengupayakan hubungan lebih luas dengan pihak

swasta, sehingga tersedianya swadaya yang lebih dalam menjalankan kerjasama *Sister City*

3.Sarana dan prasarana, perlu direvitalisasi demi terapainya tujuan *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig, masih minimnya sarana dan prasarana merupakan salah satu sebab kurang maksimalnya pelaksanaan kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig

Daftar Pustaka

Acuan Dari Buku:

Aldecoa, Francisco dan Keating, Michael. 1999. *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. London: Taylor & Francis Group.

Holsti, K.J. 2004. *Taming the Sovereigns Institutional Change in International Politics*. United Kingdom : Cambridge University Press.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosda.

Pemerintah Kota Bandung. 2011. *Sister City Kota Bandung*. Dinas Pemerintahan Kota Bandung.

Acuan artikel dalam website :

http://www.sister-cities.org/mission-and-history

http://www.bandung.go.id